

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang diberikan variabel *government size*, *regional wealth*, dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan *political monitoring* sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini meliputi seluruh LKPD wilayah kabupaten dan kota di Indonesia yang telah diaudit BPK RI pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia menunjukkan angka rata-rata sebesar 75%, yang mana menandakan masih banyak pemerintah kabupaten dan kota yang belum mengungkapkan item pengungkapan pada LKPD secara maksimal sesuai dengan standar. Hasil uji pengaruh yang diberikan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Ukuran pemerintah (*government size*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya ukuran pemerintah akan diikuti dengan tingkat pengungkapan LKPD yang juga semakin tinggi.
2. Kekayaan daerah (*regional wealth*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah akan diikuti dengan tingkat pengungkapan LKPD yang juga semakin tinggi.
3. Pendapatan antar pemerintah (*intergovernmental revenue*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi oleh besar atau rendahnya dana transfer yang diterima pemerintah daerah.
4. *Political monitoring* tidak memoderasi hubungan antara *government size* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengawasan politik pada suatu daerah tidak dapat memperkuat pengaruh ukuran pemerintah terhadap tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan LKPD.
5. *Political monitoring* memoderasi hubungan antara *regional wealth* terhadap tingkat pengungkapan LKPD secara negatif. Hal ini menunjukkan semakin tingginya tingkat

pengawasan politik, akan mengurangi pengaruh kekayaan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan LKPD..

6. *Political monitoring* tidak memoderasi hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengawasan politik pada suatu daerah tidak dapat memperkuat pengaruh pendapatan antar pemerintah terhadap tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan LKPD.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rangkaian proses yang telah dilakukan pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang meliputi:

1. Pengukuran untuk variabel *political monitoring* dalam penelitian ini hanya terbatas berdasarkan kuantitas atau jumlah anggota DPRD yang menjabat pada daerah tersebut, tanpa melibatkan pengukuran kualitas anggota DPRD.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel LKPD pada kabupaten dan kota di Indonesia yang terbatas hanya pada satu periode saja, yaitu tahun anggaran 2021.

## 5.3 Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya, meliputi:

1. Bagi pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan kota diharapkan untuk lebih memaksimalkan pengungkapan informasi pada LKPD sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 sehingga dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat daerah.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut terkait peran moderasi *political monitoring* terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan menggunakan variabel independen lainnya
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut terkait peran moderasi *political monitoring* terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan menggunakan alat ukur lainnya dalam pengukuran variabel tingkat pengungkapan LKPD (*level of disclosure*).

4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut terkait peran moderasi *political monitoring* terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan melibatkan aspek kualitas (tidak hanya kuantitas) anggota DPRD dalam pengukuran variabel *political monitoring*.
5. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut terkait peran moderasi *political monitoring* terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan memperluas sampel LKPD menjadi lebih dari satu periode tahun anggaran.